

## **Ketidakefektifan PKH dalam Menunjang Pendidikan Siswa Miskin di Jorong Aia Baba**

**Annisa Mulyasri<sup>1</sup>, Mira Hasti Hasmira<sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang**

Email: [mulyasriannisa@gmail.com](mailto:mulyasriannisa@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tidak efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu di Jorong Aia Baba Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang dari penelitian ini terlihat dari tidak efektifnya bantuan dana PKH. Masyarakat menggunakan dana PKH bukan untuk biaya pendidikan anak, padahal telah diberikan pembinaan oleh pendamping PKH. Dalam pertemuan dengan pendamping PKH telah diberikan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana PKH oleh masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan jumlah informan 27 orang. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori struktural fungsional dari Robert K. Merton, mengenai fungsi manifes dan fungsi laten, karena teori ini dirasa mampu untuk dijadikan pisau analisis untuk menganalisis temuan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jorong Aia Baba Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian terkait faktor penyebab tidak efektif PKH disebabkan karena beberapa faktor pertama, *mindset* atau cara berpikir anggota penerima bantuan PKH yang mengikuti gaya hidup tetangga. Kedua, keadaan masyarakat dipersulit karena adanya pandemi *Covid19* yang menyebabkan menurunnya pendapatan keluarga. Ketiga, disebabkan karena masyarakat terlilit hutang, sehingga ketika dana PKH cair masyarakat menggunakan dana tersebut untuk membayar hutang dan cicilan motor serta bank.

**Kata Kunci:** *Ketidakefektifan, Masyarakat Miskin, Pendidikan, PKH*

### **Abstract**

*This study aims to determine the factors causing the ineffectiveness of the Family Hope Program (PKH) in supporting the education of underprivileged students in Jorong Aia Baba Nagari Halaban, Lima Puluh Kota Regency. The background of this research can be seen from the ineffectiveness of PKH funding assistance. The community uses PKH funds not for children's education costs, even though they have been given guidance by PKH facilitators. In a meeting with PKH facilitators, socialization related to the use of PKH funds by the community has been given. The research method in this study uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation, with a total of 27 informants. The theory used to analyze this research is the structural functional theory from Robert K. Merton, regarding the manifest function and latent function, because this theory is considered capable of being used as an analytical knife to analyze the findings in this study. The research location was carried out in Jorong Aia Baba Nagari Halaban, Fifty Cities Regency, West Sumatra Province. The results of the research related to the factors causing the ineffective implementation of the Family Hope Program (PKH) were due to the first few factors, the mindset or way of thinking of PKH recipients who followed the neighbour lifestyle. Second, the condition of the community is complicated because of the Covid-19 pandemic which has caused a decline in family income. Third, because the community is in debt, so when the PKH funds are disbursed, the community uses the funds to pay debts and instalment for motorbikes and banks.*

**Keywords:** *Education, Ineffective, PKH, Poor Community*



Received: August 2, 2021

Revised: September 21, 2021

Available Online: September 30, 2021

## Pendahuluan

Kemiskinan hampir menjadi permasalahan yang umum di setiap negara, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia. Kemiskinan menjadi suatu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia saat ini karena masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Faktor pertama dalam kemiskinan diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan. Suryosubroto mendefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan yang penting dalam kegiatan pendidikan, supaya pendidikan dapat terarahkan sesuai ketentuan yang akan dilakukan (Setyawati, 2017). Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun untuk menghadapi masa depan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya (Lilik Ardiansyah, 2016). Kemiskinan dapat merusak semua aspek kehidupan, diantaranya aspek psikologis seperti rendah harga diri, selain itu juga kemiskinan dapat diwariskan ke generasi berikutnya (Irmayani, 2015). Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas (dedy Utomo, Abdul Hakim, 2019). Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan (Sedermayanti, 2001).

Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk bisa mengurangi keluarga miskin di Indonesia, berbagai macam bantuan sosial telah diberikan oleh pemerintah diantaranya dana BOS, Jamkesmas, PNPM-Mandiri, Raskin dan Program Keluarga Harapan (Claudio Usman, 2014). Kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan untuk mempersiapkan masyarakat itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab untuk kelancaran kehidupan bernegara (Kartasasmita, 2006). Salah satunya melalui Program Keluarga Miskin (PKH), program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang sosial. Program ini berusaha untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia (Syahriani, 2016). (Hidayanti, 2019) Program PKH ini telah dilaksanakan semenjak tahun 2007 di Indonesia dan sampai saat ini. PKH ini bertujuan untuk meningkatkan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan agar masyarakat yang tergolong kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bisa untuk mendapatkan pendidikan yang layak mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, dibantu dengan adanya PKH tersebut.

Program PKH memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat atau RTSM dengan memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya dalam satu kartu keluarga apabila memiliki ibu hamil, balita, anak usia pra-sekolah, anak usia sekolah (SD-SMA), lansia dan mempertimbangkan keadaan ekonomi dari masyarakat tersebut. Adapun masyarakat yang dikelompokkan mendapatkan bantuan di bidang pendidikan apabila memiliki anak yang usia sekolah, selain dari itu maka dikelompokkan ke dalam pelayanan kesehatan.

Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya yaitu pendidikan. Masalah pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia, ketika pendidikan masyarakat bermasalah maka juga akan berdampak

terhadap kehidupan sosial yang lainnya. Karena tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan yang sama karena tersendat masalah ekonomi, maka dari itu pemerintah mengeluarkan PKH untuk bisa mengatasi hal tersebut, dasar pelaksanaan keputusan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008, keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan sikap mental seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak yang membantunya (Prichatin, 2019).

Masyarakat selain menerima dana tunai dalam program PKH juga diberikan bantuan kebutuhan pokok seperti beras sepuluh kilogram, buah-buahan yang dibagikan biasanya jeruk, telur 25 butir dan tahu, untuk pembagian kebutuhan pokok ini diberikan rutin setiap bulannya. Dana tunai dibagikan setiap empat kali setahun, tapi semenjak masuk wabah *Covid19* ke Indonesia maka dana tunai dibagikan setiap satu bulan sekali. Nagari Halaban terdapat delapan jorong yaitu Jorong Lompek, Jorong Aia Baba, Jorong Alang Lawas, Jorong Lambuak, Jorong Kubang, Jorong Atas Halaban, Jorong Kabun, Jorong Kapalo koto. Masing-masing masyarakat di Jorong tersebut mendapatkan bantuan PKH.

Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian penulis adalah pada layanan pendidikan karena salah satu tujuan PKH adalah untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi keluarga yang tergolong kepada RTSM, realita yang terjadi di lapangan setiap kali pembagian dana PKH yang telah didistribusikan oleh pemerintah tersebut tidak dijalankan dengan semestinya oleh masyarakat penerima, dana tersebut seharusnya dialokasikan kepada anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan dari SD-SMA, namun kenyataan yang terjadi di lapangan dana tersebut justru tidak dialokasikan masyarakat kepada pendidikan anak-anak mereka, padahal dalam satu bulan sekali dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Nagari Halaban untuk membina dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dana ini seharusnya dialokasikan kepada pendidikan anak mereka, bukan untuk hal lainnya di luar pendidikan anak seperti membayar cicilan motor, membayar cicilan bank sementara dana tidak dialokasikan untuk pendidikan anak.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak efektifnya PKH dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu. Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala serta wawasan masyarakat ilmiah mengenai ketidakefektifan bantuan PKH dalam menunjang pendidikan siswa miskin. Penelitian mengenai PKH ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya Nurul Aini (2018) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini yaitu untuk mengetahui apakah dengan adanya PKH di Kelurahan Way Dadi dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada selama ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan adanya PKH berhasil menurunkan angka kemiskinan, seperti membawa perubahan perilaku dan kemandirian peserta PKH dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan sosial. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dey Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam

Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). Hasil penelitian dari Dey Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto yaitu menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PKH yang dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil evaluasi membuktikan penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.

Berangkat dari pemaparan pendahuluan dan literatur review di atas, jika dilihat dari objek kajian memiliki kesamaan yaitu mengenai PKH, hanya saja jika beberapa penelitian terdahulu berfokus pada implementasi PKH dan pelaksanaan PKH maka pada artikel ini peneliti fokus pada penyebab tidak efektifnya PKH dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu. Dengan demikian kebaruan dalam penelitian ini mendeskripsikan realita mengenai penyebab tidak efektifnya program bantuan PKH dengan menggunakan perspektif Robert K. Merton. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu penyebab tidak efektifnya PKH.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan tersebut dipilih karena peneliti ingin mendapatkan data penelitian berdasarkan keterangan secara mendalam baik lisan maupun tulisan. Sekaligus memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (J, 2004) Kategori instrumen yang baik adalah instrumen yang memiliki pemahaman yang baik akan metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (*human instrumen*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara mendalam dan dokumentasi (Mansyur, 2017). Wawancara dilakukan secara langsung dengan masyarakat penerima bantuan PKH di Jorong Aia Baba. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kehidupan penerima bantuan PKH di Jorong Aia Baba.

Adapun proses dan analisis data menurut Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (*human instrumen*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subyek yang diteliti. Proses triangulasi yang peneliti lakukan yaitu triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila data ketiga teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar (Sugiyono, 2012).

Analisis data menurut Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Adapun proses dan analisis data menurut Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data, Inti dari reduksi data adalah untuk memisahkan mana data yang penting atau relevan dengan penelitian mana yang tidak relevan dengan penelitian kemudian data tersebut diverifikasi (Sugiyono, 2012). Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya. Proses reduksi data ini peneliti lakukan dengan memisahkan pernyataan informan yang relevan dengan data yang peneliti perlukan, dan mana yang tidak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pernyataan dari informan penulis catat setelah itu baru penulis pisahkan mana data yang relevan mana data yang tidak relevan dengan penelitian ini.

Dengan demikian proses reduksi data mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan dirancang untuk menggabungkan informasi yang padu. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan analisis data yang telah disimpulkan ada tahap reduksi data agar diperoleh data yang akurat (J, 2004). Dalam proses penyajian data peneliti melakukan yang pertama memahami jawaban dari informan, kemudian peneliti mengelompokkan data tersebut sesuai dengan topik penelitian ini, lalu setelah peneliti memahami jawaban tersebut peneliti sajikan dalam bentuk paragraf dan tabel untuk memudahkan peneliti dalam mengelompokkan data.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini melalui pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti sendiri, Tipe Penelitian ini yaitu studi kasus tepatnya berada pada Jorong Aia Baba Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini mengkaji terkait dengan program PKH dalam menunjang pendidikan siswa miskin, melalui tipe penelitian studi kasus peneliti mendalami suatu pelaksanaan program bantuan PKH dalam menunjang pendidikan siswa miskin di Jorong Aia Baba. Proses triangulasi yang peneliti lakukan yaitu triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila data ketiga teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar (Sugiyono, 2012). Teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis temuan dalam penelitian ini adalah Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton untuk mengkaji atau menganalisis permasalahan mengenai tidakefektifnya PKH dalam menunjang pendidikan siswa miskin. Merton mengemukakan bahwa objek analisa sosiologi adalah pada fakta sosial.

Fakta sosial yang dimaksud adalah peranan *social organisation* sosial dan lainnya. Robert K. Merton menitikberatkan teori struktural fungsional terhadap konsekuensi-konsekuensi objektif terhadap perilaku individu. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dalam masyarakat dapat bertentangan dengan fakta, karena dalam faktanya dapat terjadi fungsional bagi individu dalam masyarakat tertentu. Fungsional bagi suatu kelompok masyarakat belum tentu fungsional bagi kelompok masyarakat lainnya. Sesuai dengan fungsinya bahwa PKH adalah sebuah program bantuan sosial tunai salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin, sesuai dengan fungsinya dan ada dasar pembentukannya, namun fakta yang terjadi bahwa fungsi yang diharapkan tersebut ketika di lapangan justru menimbulkan fakta yang berbeda, masyarakat menggunakan dana PKH di luar keperluan pendidikan anak.

Hal ini yang dijelaskan oleh Merton bahwa kesatuan fungsional dalam masyarakat, dapat berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Merton menjelaskan dalam teori struktural fungsional bahwa dalam masyarakat ada fungsi *manifest* dan fungsi *laten*. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Robert K. Merton mengenai fungsi *manifest* dan fungsi *laten*, fungsi *manifest* adalah fungsi yang diharapkan terjadi di masyarakat, sedangkan fungsi *laten* adalah fungsi yang tidak diharapkan terjadi oleh masyarakat, masyarakat atau kelompok sosial terbentuk karena adanya sebuah pengharapan besar yang ada dalam diri individu masyarakat dapat membuktikan perkembangan tersebut melalui realitas sosial yang merupakan sebuah tujuan bersama ataupun dari individu itu sendiri. Fungsi manifest untuk membantu pendidikan anak yang tergolong ke dalam RTSM, seharusnya dana bantuan PKH direalisasikan masyarakat hanya untuk pendidikan anak, sesuai dengan tujuan PKH dan informasi ini juga telah diberikan oleh pembina PKH melalui pertemuan dengan anggota PKH. PKH adalah sebuah program dengan harapan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat melalui pemberian dana tunai tersebut agar supaya pendidikan anak-anak yang berada pada golongan rumah tangga miskin dapat mendapatkan layanan pendidikan, agar ketimpangan sosial antara masyarakat yang mampu dan masyarakat miskin bisa dikurangi salah satunya dengan pemberian bantuan pendidikan melalui PKH.

Tujuan PKH belum bisa terlaksana maksimal bagi masyarakat. Terkait dengan adanya pelaksanaan PKH yang dapat dilihat dari penggunaan dana bantuan tersebut bahwa seharusnya dana fungsional terhadap pendidikan siswa yang tergolong dalam RTSM justru memiliki konsekuensi yang tidak diharapkan, hal ini dapat dilihat ketika masyarakat menerima bantuan PKH penggunaan dana tersebut fungsi latennya dibayarkan kepada cicilan motor dan cicilan bank serta untuk membayar hutang masyarakat penerima bantuan PKH, dimana seharusnya dana tersebut digunakan untuk pendidikan anak.

Selain masyarakat menggunakan untuk membayar cicilan, penggunaan dana PKH digunakan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Penggunaan dana ini tentunya tidak sesuai dengan landasan awal dilaksanakannya PKH oleh instansi dinas sosial terkait, walaupun ada pembekalan yang diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH ini secara rutin, namun tetap saja hal ini tidak efektif. Keadaan masyarakat di Jorong Aia Baba secara ekonomi layak mendapatkan bantuan, namun untuk penggunaan dana PKH masyarakat belum bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga sebegitu apapun program dari pemerintah kalau penggunaan di lapangan tidak baik maka program tersebut tidak akan efektif ke tangan masyarakat, peneliti tidak bisa menutup mata dengan keadaan masyarakat yang saat ini sedang tidak normal keadaan keuangan karena adanya pandemi yang membuat penurunan pendapatan keluarga. Sehingga dengan menggunakan teori struktural Robert K. Merton mengenai fungsi manifest dan fungsi laten sangat cocok digunakan untuk menganalisis temuan penulis.

Peneliti melihat fakta bahwa penggunaan dana PKH oleh masyarakat untuk membayar hutang serta cicilan motor dan cicilan bank dan membeli kebutuhan pokok. Seharusnya penggunaan dana PKH khususnya bagi masyarakat di Jorong Aia Baba adalah untuk pendidikan anak, namun hal tersebut belum terealisasi dengan baik. Artinya dana PKH belum berfungsi dengan baik untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat di Jorong Aia Baba. Perlu adanya penegasan baik dari pendamping PKH untuk kedepannya agar penggunaan dana PKH ini relevan dengan program PKH, karena ini menyangkut kelangsungan pendidikan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dari kemajuan suatu negara. Semakin baik pendidikan masyarakat maka semakin maju juga sebuah negara.

### **Mindset (Pola Pikir)**

*Mindset* seseorang akan memengaruhi ia dalam menyikapi sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya *mindset* dalam menentukan karakter dan kehidupan seseorang. *Mindset* atau pola pikir dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak terhadap kehidupannya, seperti yang terjadi di Jorong Aia Baba dimana kehidupan masyarakat pada umumnya yang mendapatkan PKH tergolong ke dalam rumah tangga miskin sehingga layak mendapatkan bantuan PKH dan juga sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh PKH tersebut. Di Jorong Aia Baba ketika masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH. Terkait dengan *mindset* yaitu ketika anak tetangga yang tidak mendapat bantuan PKH memiliki *smartphone* baru maka masyarakat penerima bantuan PKH juga membelikan *smartphone* untuk anak mereka. Barang baru yang dimiliki oleh tetangga yang tidak mendapatkan bantuan PKH harus dimiliki juga oleh masyarakat khususnya penerima bantuan PKH di Jorong Aia Baba. Sementara keadaan ekonomi masyarakatnya yang mendapat bantuan PKH tergolong tidak mampu, maka jalan yang dipilih masyarakat meminjam uang kepada tetangga. Pembayaran pinjaman melalui dana bantuan PKH oleh masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan (DP) salah satu informan peneliti yang menjelaskan, tidak tega melihat anak kalau tidak memiliki *smartphone* sementara temannya memiliki *smartphone*, hal tersebut didukung juga dengan adanya metode pembelajaran daring saat ini sehingga masyarakat membelikan *smartphone* untuk anak (wawancara 8 Februari 2021). Hal ini menyebabkan tidak efektifnya dana PKH untuk pendidikan di Jorong Aia Baba karena masyarakat harus mengikuti apa yang dibeli tetangga walaupun keadaan ekonomi masyarakat tidak mencukupi, namun masyarakat menjadikan uang atau bantuan PKH untuk membayar hutang tersebut kalau dana bantuan sudah cair ke masyarakat.

Sesuai dengan pernyataan informan EM (39 Th) “Kalau bagi orang tua nak keperluan anak didahulukan, saya bekerja kan untuk anak, jadi iya didahulukan apa keperluan anak apalagi kalau menyangkut dengan sekolah, sekarang sudah ada corona jadi sekolah dari rumah, kalau tidak ada *smartphone* bagaimana anak sekolah, jadi iya berusaha meminjam uang kalau untuk sekolah bagi saya. Kasian saya melihat anak kalau dia tidak punya *smartphone* untuk sekolah, terasa sama saya kalau tidak punya itu, nanti melihat temannya main *smartphone* atau sekolah dengan *smartphone*, tentu tidak mungkin kita meminjam terus sama orang lain. Baju untuk lebaran itu sudah wajib, tidak bisa tidak nak, sekali satu tahun tidak akan dibeli kan anak, kasihan saya sama anak”. Hal serupa juga disampaikan oleh informan RM (48 Th) “ zaman sekarang sepertinya memang harus punya *smartphone*, apalagi anak sekolah kalau tidak punya *smartphone* tidak bisa sekolah, sedikit-sedikit perlu *smartphone* jadi kasian sama anak kalau tidak memiliki *smartphone* tersisih dari teman-temannya, dan kalau untuk baju anak kadang-kadang dana PKH itu disisihkan sedikit, jadi sesekali saya bawa anak ke Pasar Alang lawas untuk membelikan baju anak”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh DP (35 Th) “ anak merupakan prioritas utama bagi saya, apalagi sekarang sekolah online jadi harus punya *smartphone* , kalau tidak ada maka sulit untuk melakukan pembelajaran. Anak minta *smartphone* yang kapasitas penyimpanan teleponnya yang besar seperti temannya, supaya bisa menyimpan pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi kalau tidak ada memang harus diusahakan bagaimanapun caranya supaya anak bisa punya *smartphone* walaupun meminjam dulu ke tetangga karena *smartphone* itu perlu banget zaman sekarang. Nanti kalau tidak dibelikan bagaimana anak mau sekolah, kawan sebayanya memiliki *smartphone* sementara anak saya tidak punya jadi saya tidak tega, kasihan anak saya kalau numpang sama temannya terus, kadang temannya

mau kadang tidak mau, nanti masalah pembayaran untuk membeli *smartphone* itu kadang ketika uang PKH cair, tapi kalau ada uang tidak harus menunggu uang PKH cair, kalau ada uang dari suami dan saya istri) langsung dibayarkan”.

Selain membeli *smartphone* masyarakat penerima bantuan PKH membelikan baju untuk anak, baju yang dimaksud bukan baju sekolah tapi baju untuk lebaran dan baju main, karena menurut anggota penerima bantuan PKH ketika lebaran anak harus dibelikan baju lebaran agar tidak tersisih dibandingkan dengan temannya. Padahal hal tersebut diketahui masyarakat bahwa dana PKH seharusnya dialokasikan untuk administrasi pendidikan anak yang saat ini menempuh pendidikan. Ketika ada pembayaran administrasi sekolah anak sementara dana PKH sudah tidak adalagi karena telah dibelikan kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan anak. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan padahal sebenarnya diberikan dana PKH adalah untuk menunjang layanan pendidikan siswa yang tergolong masyarakat miskin. Hal ini sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat ketika apa yang dimiliki orang lain juga harus dimiliki oleh mereka padahal keadaan ekonomi masyarakat tidak mendukung. Akhirnya sikap masyarakat terhadap bantuan PKH tidak relevan dengan tujuan awal adanya PKH ini sebagai penunjang dalam meningkatkan layanan pendidikan siswa miskin.

### **Pandemi Covid-19**

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus *Corona (COVID-19)* sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 Artinya, Virus Corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebaran yang meluas Hampir seluruh sektor terdampak karena adanya pandemi tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Virus *Corona*. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen. Pandemi *Covid-19* membuat sektor ekonomi masyarakat melemah, seperti halnya yang terjadi di masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH di Jorong Aia Baba, keadaan masyarakat di Jorong Aia Baba Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, suami dan istri bekerja untuk menunjang pendapatan keluarga sebelum terjadinya pandemi *covid19*. Suami bekerja sebagai buruh tani sedangkan istri bekerja sebagai pengrajin tenun songket, namun karena adanya pandemi *covid-19* saat ini toko tenun songket ditutup sehingga masyarakat (istri) yang bekerja diberhentikan oleh induk semang songket, sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan keluarga penerima bantuan PKH karena penunjang pendapatan keluarga hanya suami.

Hal tersebut menyebabkan ketika dana bantuan PKH cair digunakan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok yang habis, sesuai dengan pernyataan informan AN (wawancara tanggal 13 Februari 2021) “sekarang ini hidup susah karena adanya corona ini, biasanya ada tenun sogket bisa menolong pemasukan keluarga namun sekarang tokok tenun banyak yang tutup di Bukittinggi. Toke tenun di sini menjual kain ke Bukittinggi, sekarang karena covid toko ditutup dan kami yang bekerja sebagai pengrajin dihentikan oleh induk semang, kalau diharapkan uang dari suami saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi kalau sudah seperti ini sudah susah. Saat saya bekerjapun kadang-kadang masih kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan pokok apalagi suami yang bekerja sendiri, pasti banyak kurangnya. Jadi ketika dana PKH cair uangnya terpakai untuk membeli kebutuhan pokok keluarga saya”.



Hal serupa juga disampaikan oleh IC (45 Th) “ kalau sekarang sudah susah nak, yang tidak pernah terjadi sudah terjadi seperti sekarang ini adanya wabah pandemi covid, dahulu sebelum adanya covid ini saya bisa menolong suami bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, namun sekarang karena adanya pandemi ini saya yang bekerja sebagai penenun songket sudah tidak bisa bekerja lagi karena toko tenun sudah ditutup jadi kami dihentikan oleh toke songket untuk membuat songketnya, yang namanya kita anak buah tentu harus diterima. Walaupun sebenarnya bagi saya itu sangat diharapkan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga”. Sesuai dengan pernyataan informan selanjutnya AN (35 Th) “ sekarang hidup susah banyak yang tidak ada dibandingkan dengan yang ada, karena musibah pandemi saat ini yang terjadi, saya biasanya bisa menolong suami dengan bekerja juga membuat tenun songket namun sekarang sudah dihentikan oleh induk semang karena toko banyak yang tutup, jadi ketika dana bantuan cair saya harus menggunakan dana itu untuk membeli beras karena itu kebutuhan utama keluarga saya”. Hal ini membuat dana PKH yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan tidak direalisasikan oleh masyarakat, karena pendapatan keluarga menurun akibat pandemi, jadi ketika kebutuhan pokok habis maka yang diutamakan tentu kebutuhan keluarga seperti beras dan lauknya untuk dikonsumsi keluarga.

### ***Terlilit Hutang***

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan ada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Syauqi, 2016). Keadaan masyarakat di Jorong Aia Baba Nagari Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, menggunakan dana PKH untuk membayar cicilan bank dan motor. Karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk menopang pengeluaran keluarga. Sesuai dengan penjelasan HM, Ketika datang tanggal jatuh tempo cicilan bank dan cicilan motor maka masyarakat membayarkan dengan dana PKH, sementara untuk pendidikan anak nanti diusahakan lagi oleh masyarakat, hal ini terjadi karena pembayaran administrasi pendidikan anak dikasih tenggang waktu oleh sekolah jadi masyarakat membayar ketika tenggang waktu pembayaran sudah habis jadi tidak per bulan dibayarkan untuk pendidikan anak, hal ini sesuai dengan pernyataan informan HM (52 Th) “ kalau pas penerimaan dana PKH, karena ada keperluan mendesak seperti pembayaran bank yang jatuh tempo, maka dana bantuan saya alokasikan dulu untuk membayar bank kalau masalah pembayaran sekolah anak alhamdulillah ada tenggang waktu yang diberikan oleh sekolah, jadi ketika waktu yang telah ditentukan aja nanti dibayarkan untuk sekolah anak saya”. Hal serupa juga disampaikan oleh WT (39 Th) “ sekarang itu umumnya yang punya hutang, saya juga ada hutang ke bank kadang untuk pembayarannya terpakai dana PKH kalau terdesak tapi setelah itu saya ganti kembali, karena bagaimanapun itu dana untuk pendidikan anak dikasih sama pemerintah”.

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang dana PKH dijadikan oleh masyarakat untuk membayar cicilan mereka karena keadaan ekonomi masyarakat yang tidak mencukupi, untuk pembayaran sekolah anak itu ada tenggang waktu yang diberikan oleh sekolah jadi masyarakat membayar uang sekolah anak ketika nanti sudah jatuh tempo tanggal pembayarannya. Namun ada juga masyarakat yang mengganti uang PKH yang mereka pakai untuk membayar cicilan, karena menurut salah satu informan bahwa dana PKH sebenarnya diberikan pemerintah untuk pendidikan anak.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton mengenai teori struktural fungsional upkan dan akibat yang tidak diharapkan ntuk mengkaji atau menganalisis permasalahan mengenai tidakefektifnya PKH dalam menunjang pendidikan anak kurang mampu. Merton mengemukakan bahwa objek analisa sosiologi adalah pada fakta sosial. Setiap tokoh pengemuka teori struktural fungsional memusatkan perhatian terhadap fungsi dari fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya. Fakta sosial yang dimaksud adalah peranan sosial, organisasi sosial dan lainnya. Merton menjelaskan bahwa tindakan akan mempunyai akibat yang diharapkan dan akibat yang tidak diharapkan, meskipun dalam masyarakat keinginan untuk mengemukakan tindakan yang diharapkan selalu ada. PKH adalah sebuah program bantuan sosial tunai dimana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin, sesuai dengan fungsinya dan ada dasar pembentukannya, namun fakta yang terjadi bahwa fungsi yang diharapkan tersebut ketika di lapangan belum sesuai dengan harapan.

Dengan mengemukakan konsep fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan terjadi dalam masyarakat, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan adanya pelaksanaan program bantuan sosial PKH yang dilaksanakan oleh dinas sosial dimana tujuan dilaksanakannya PKH adalah untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan bagian pendidikan saja. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton mengenai fungsi manifes yaitu pengalokasian dana PKH untuk menunjang pendidikan siswa miskin di Jorong Aia Baba Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam pelaksanaan program PKH di Jorong Aia Baba untuk pengalokasian dana PKH untuk menunjang pendidikan siswa miskin belum terealisasi dengan baik, hal ini terlihat ketika masyarakat menggunakan dana PKH untuk membayar cicilan bank, cicilan motor, membeli kebutuhan pokok untuk keluarga, hal ini belum sesuai dengan tujuan awal dilaksanakannya PKH oleh dinas sosial terkait, maka hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton mengenai konsep fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak diharapkan terjadi dalam masyarakat, dimana seharusnya dana PKH digunakan untuk menunjang pendidikan anak namun masyarakat tidak mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan PKH. Robert K. Merton menegaskan bahwa apa yang fungsional bagi suatu masyarakat belum tentu fungsional bagi masyarakat lainnya, hal ini juga sesuai dengan penggunaan dana PKH oleh masyarakat, bahwa pelaksanaan PKH oleh masyarakat fungsional tapi penggunaannya belum sesuai dengan tujuan PKH. Belum fungsional nya oleh masyarakat karena tidak dialokasikan untuk membayarkan uang pendidikan anak. Hal ini yang dijelaskan oleh Merton bahwa kesatuan fungsional dalam masyarakat, dapat berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## **Kesimpulan**

Adapun penggunaan dana PKH oleh masyarakat di Jorong Aia Baba Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban digunakan untuk membeli *smartphone*, membayar cicilan motor dan cicilan bank, membeli baju lebaran, membeli kebutuhan pokok, sedangkan penggunaan dana PKH seharusnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah ataupun membayarkan dana sekolah anak yang tergolong ke dalam RTSM, namun masyarakat menggunakan dana tersebut tidak untuk pendidikan anak. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan PKH ini karena beberapa hal diantaranya karena *mindset* masyarakat penerima

bantuan PKH yang mengikuti gaya hidup tetangga yang tidak mendapatkan bantuan PKH. Penyebab ketidakefektifan PKH selanjutnya kerana adanya pandemi *Covid19* dan selanjutnya adalah karena keadaan masyarakat yang terlilit hutang di Jorong Aia Baba Nagari Halaban sehingga ketika dana PKH cair masyarakat menggunakan dana PKH untuk membayar hutang.

### Daftar Pustaka

- Claudio, U. (2014). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Dedy, U, Abdul, H. R. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Rumah Tangga Miskin (Studi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Administrasi Publik*, 2(29).
- Hidayanti, R. N. (2019). *Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Program Keluarga Harapan Kualitas Pendampingan dan Pengelolaan Dana Bantuan di Desa Ngreco, Weru, Sukoharjo*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Irmayani, T. N. (2015). Perilaku Coping Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menjelang Exit Program di Jakarta. *Sosio Konsepsia*, 4(178).
- Maleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Kartasasmita, K. (2006). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cakra.
- Lilik, A. (2016). *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Mansyur, D. G. dan F. AL. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-uzz Media
- Prichatin, A. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- Rahardjo, R. (2011). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Sedermayanti, S. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Setyawati, D. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Terhadap Cara Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak di Desa Kemas Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017*. IAIN Surakarta
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syahriani, S. (2016). *Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Desa Marioraja Kabupaten Soppeng*. Universitas Negeri Makassar
- Syauqi, D. I. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Miskin di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kecamatan Goa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar